

Preferensi Pemilik Hutan Rakyat di Kabupaten Gunungkidul Terhadap Skema Pinjaman Tunda Tebang

oleh
Fadilla Annisa Harahap

INTISARI

Hutan rakyat berperan penting dalam kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Sejak tahun 2013, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) telah menggunakan pohon sebagai jaminan pada program pinjaman tunda tebang yang digunakan sebagai modal usaha produktif. Namun demikian, BPDLH juga melaporkan tidak terserapnya target pinjaman dan adanya kredit pinjaman macet, yang telah diantisipasi dengan beberapa kali perubahan skema pinjaman. Perubahan tersebut belum berdasar pada kajian preferensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui preferensi pemilik hutan rakyat terhadap skema program pinjaman dengan mempertimbangkan atribut pinjaman dan karakteristik sosial ekonomi responden. Metode *choice experiment* (CE) digunakan untuk mengetahui preferensi dan mengestimasi peluang penerimaan skema pinjaman dari 96 responden debitur dan 96 responden non-debitur di Kabupaten Gunungkidul. Hasil analisis deskriptif menunjukkan usia dan tingkat pendidikan responden berpengaruh terhadap keputusan penerimaan skema pinjaman. Atribut yang menjadi pertimbangan dan penting menurut responden berdasarkan koefisien model yaitu kegiatan monitoring, tenor, plafon, frekuensi angsuran, jumlah jaminan dan lama proses. Model *conditional logit* juga menunjukkan hasil bahwa keberadaan monitoring, tenor yang panjang, dan semakin tinggi plafon pinjaman akan meningkatkan preferensi responden. Sedangkan semakin sering frekuensi angsuran, semakin tinggi suku bunga, semakin banyak jumlah jaminan dan semakin lama proses menurunkan preferensi responden terhadap skema. Analisis *willingness to accept* juga menunjukkan hasil konsisten. Skema berjalan saat ini hanya dipilih sebesar 17% untuk kelompok debitur dan 34% kelompok non-debitur. Dengan memodifikasi skema yang berlaku saat ini yaitu peningkatan tenor menjadi 5 tahun, mengurangi frekuensi angsuran menjadi 2 kali setahun serta plafon pinjaman menjadi Rp 80 juta, akan meningkatkan probabilitas pemilihan menjadi 68% kelompok debitur dan 92% bagi kelompok non-debitur. Penerapan suku bunga 0% atau skenario syariah juga meningkatkan probabilitas menjadi 77% kelompok debitur dan 99% kelompok non-debitur. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penyempurnaan desain skema pinjaman tunda tebang yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Preferensi, Hutan Rakyat, Pinjaman Tunda Tebang, *Choice Experiment*, BPDLH

Preferences of Smallholder Private Forest in Gunungkidul Regency for the Postponed Harvest Loan Scheme

by

Fadilla Annisa Harahap

ABSTRACT

Community forests play an important role in community welfare and environmental sustainability. Since 2013, the Indonesia Environmental Fund (BPDLH) has used trees as collateral in a postponed harvest loan program used as productive business capital. However, BPDLH also reported that loan targets were not met and that there were non-performing loans, which were anticipated by several changes to the loan scheme. These changes have not been based on preference studies. This research aims to determine the preferences of community forest owners toward loan program schemes by considering loan attributes and the socio-economic characteristics of respondents. The choice experiment (CE) method was used to determine preferences and estimate the acceptance probability of loan schemes from 96 debtor respondents and 96 non-debtor respondents in Gunungkidul District. Descriptive analysis results indicate that respondents' age and education level influence their decision to accept the loan scheme. The attributes considered important by respondents, based on model coefficients, include monitoring activities, tenor, loan limit, instalment frequency, collateral amount, and processing time. The conditional logit model also shows that the presence of monitoring, a longer tenor, and a higher loan limit increase respondents' preferences. Meanwhile, more frequent instalments, higher interest rates, more collateral, and longer processing times reduce respondents' preference for the scheme. The willingness to accept analysis also shows consistent results. The current scheme is only chosen by 17% of the debtor group and 34% of the non-debtor group. By modifying the current scheme, increasing the tenor to 5 years, reducing the instalment frequency to twice a year, and setting the loan limit at Rp 80 million—the probability of selection increases to 68% for the debtor group and 92% for the non-debtor group. Implementing a 0% interest rate or a syariah scenario also increases the probability to 77% for the debtor group and 99% for the non-debtor group. The findings from this study can serve as a basis for improving the design of a more adaptive, inclusive, and sustainable postponed harvest loan scheme.

Keywords: Preferences, Community Forest, Postponed Harvest Loan, Tree Collateral, Choice Experiment, BPDLH